MAKALAH MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
BADAN WAKAF INDONESIA

DISUSUN OLEH

Kelompok 12 :

Rizky Amaliyah Ramdhani Ilham (90500119068)

Andi Aisyah (90500119076)

Dosen pengampu :

Supriadi Hamid, S.E.I., M.E.I

PERBANKAN SYARIAH KELAS C
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang hingga saat ini masih berkenan memberikan kepercayaan-Nya kepada kita semua untuk menikmati segala karunia-Nya dan hanya berkat rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan makalah ini. Tugas makalah diskusi kelompok mata kuliah manajemen zakat dan wakaf ini sendiri dibuat guna memenuhi salah satu tugas dari dosen mata kuliah manajemen zakat dan wakaf.

Kami menyadari dalam pembuatan makalah ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk di masa yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 22 September 2021

Penyusun

KELOMPOK 12

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN.....	5
BAB II	6
PEMBAHASAN.....	6
A. SEJARAH BADAN WAKAF INDONESIA	6
B. VISI DAN MISI BADAN WAKAF INDONESIA	7
C. TUGAS DAN WEWENANG BADAN WAKAF INDONESIA	7
D. SUSUNAN PENGURUS BADAN WAKAF INDONESIA	8
E. PERWAKILAN BWI.....	10
G. PERAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM PENGORGANISASIAN WAKAF PRODUKTIF	13
H. PERAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA.....	15
BAB III.....	18
PENUTUP.....	18
A. KESIMPULAN	18
B. SARAN.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu ibadah yang berkaitan dengan harta seorang muslim, seperti halnya zakat, infaq dan shadaqoh. Di masa perkembangan Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Dalam sejarah peradaban Islam, sejak awal ditasyrikkannya, wakaf telah memiliki peran yang sangat penting dalam langkah-langkah meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam pada masa itu dan masa-masa selanjutnya. Hal ini disebabkan bahwa prinsip wakaf adalah memadukan dimensi ketakwaan kepada Allah dan kesejahteraan seorang muslim.

Wakaf di Indonesia bukan merupakan hal yang tabu, banyak sekali umat Islam yang mewakafkan hartanya baik dalam bentuk tanah maupun bangunan, di Indonesia tanah wakaf dari tahun ke tahun terus meningkat. Akan tetapi hal yang sangat disesalkan karena mayoritas masyarakat di Indonesia mengenal wakaf hanya dalam batas ruang lingkup sosial dan keagamaan, dalam arti lain pemberian harta wakaf dalam kepentingan tersebut seperti halnya pembuatan masjid, mushola, pesantren, pemakaman dan lain-lain. Menurut data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2011) bahwa di Indonesia dalam pemanfaatan tanah wakaf mayoritas digunakan untuk tempat peribadahan, sebesar 43,72% digunakan untuk pembuatan masjid, 30,15% musholla, 10,59% sekolah, 8,31% sosial, 4,26% pemakaman dan 2,98% pesantren. Pemanfaatan tanah wakaf hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat ibadah dan sosial, apabila penggunaan di salurkan kepada hal yang bersifat ekonomi, tentu wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan umat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah Badan Wakaf Indonesia ?
2. Apa Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia ?
3. Apa saja Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia ?
4. Bagaimana Peran Badan Wakaf Indonesia ?

C. Tujuan

1. Mengetahui Sejarah Badan Wakaf Indonesia
2. Untuk mengetahui Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia
3. Untuk mengetahui Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia
4. Mengetahui Peran Badan Wakaf Indonesia dalam
Pengorganisasian Wakaf Produktif dan Pengembangan Wakaf
Uang di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Lembaga Badan Wakaf Indonesia dibentuk tidak terlepas dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang sudah mengamalkan ajaran Islam yaitu wakaf dan menjadi adat di kalangan muslim seperti mewakafkan tanah untuk masjid dan fasilitas sosial lain. Merunut sejarah tentang praktik wakaf sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ, yang menurut sejarah wakaf pertama adalah tanah Masjid Quba lalu Masjid Nabawi. (Wikipedia)

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.

B. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia

1

C. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut²:

¹ <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia>, badan Wakaf Indonesia (BWI). 2008-07-

31. Diakses Tanggal 2021-09-21.

² Buku undang-undang nomor 41 tahun 2004 dalam Bab VI Pasal 47 sampai pasal 54 tentang Badan wakaf Indonesia (BWI). Dan peraturan pelaksanaannya terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya perwakafan di Indonesia.

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.³

D. Susunan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2020-2024⁴

Dewan Pertimbangan

Ketua: Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

Anggota: Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag

Anggota: Drs. H. Tarmizi Tohor, MA

Anggota: Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur

Anggota: Dr. Imam Teguh Saptono

Badan Pelaksana

Ketua: Prof. Dr. H. Mohammad NUH

Wakil Ketua I: Dr. Imam Teguh Saptono

Wakil Ketua II: Dr. Yuli Yasin, MA

Sekretaris: H. Sarmidi Husna, MA

Wakil Sekretaris: drh. Emmy Hamidiyah, M.Si

Bendahara: H. Mochammad Sukron, SE

Wakil Bendahara: Hafiz Gaffar, S.E, M.M

Pusat Kajian dan Transformasi Digital :

Ketua : Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., Ph.D

Anggota : Prof. Dr. Nurul Huda, SE, MM, M.Si

³ Ibid., hal 25

⁴ "Susunan Pengurus BWI Periode 2021-2024 | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id". Badan Wakaf Indonesia (BWI). Diakses tanggal 2021-09-21.

Anggota: Ir. Arief Rohman Yulianto, M.M

Anggota: Hendri Tanjung, MBA., Ph.D

Anggota : Drs. H. Susono Yusuf

Divisi-divisi Badan Wakaf Indonesia

Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan :

Ketua Divisi: Dr. Hendri Tanjung

Anggota: Hafiz Gaffar, S.E, M.M

Anggota : drh. Emmy Hamidiyah, M.E

Anggota: Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M

Anggota: H. Nur Syamsudin Buchori, SE, S.Pd, M.Si, CIRBD

Anggota: Prof. Dr. Nurul Huda, SE, MM, M.Si

Anggota: Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., Ph.D

Anggota: Hasanudin Rahman Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn

Anggota: H. Mochammad Sukron, SE

Pengawasan dan Tatakelola :

Ketua Divisi: Arzul Andaliza, Ak., M.B.A., CA., QIA., CACP

Anggota: H. Nur Syamsudin Buchori, SE, S.Pd, M.Si, CIRBD

Anggota: Dede Haris Sumarno, S.E., M.M

Anggota : drh. Emmy Hamidiyah, M.E

Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh :

Ketua Divisi: Jauhar Arifin, S.H., Sp.N

Anggota: Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si

Anggota : Hasanudin Rahman Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn

Humas, Sosialisasi dan Literasi Wakaf

Ketua Divisi: Dr. Samsul Ma'arif, M.Ag

Anggota : Drs. H. Susono Yusuf

Anggota : Dr. Ir. Agus Priyatno, M.M

Anggota : Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur

Anggota : Dede Haris Sumarno, S.E., M.M

Anggota : H. Ahmad Zubaidi, M.A

Kerjasama, Kelembagaan dan Advokasi :

Ketua Divisi : Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur
Anggota : H. Ahmad Zubaidi, M.A
Anggota : Jauhar Arifin, S.H., Sp.N
Anggota : Arzul Andaliza, Ak., M.B.A., CA., QIA., CACP
Anggota : Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag, S.H, M.Si

E. Perwakilan BWI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BWI membentuk perwakilan BWI provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan BWI kabupaten/kota untuk daerah tingkat dua. Perwakilan BWI provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI. Sementara itu, perwakilan BWI kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan mempunyai hubungan hierarkis dengan perwakilan BWI provinsi.

Tugas dan Wewenang Perwakilan BWI :

- Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi.
- Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar.
- Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
- Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
- Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan BWI.

Perwakilan BWI Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota.

- Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Kabupaten/Kota, baik ke dalam maupun ke luar.
- Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi.
- Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi.
- Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Perwakilan BWI Provinsi.

Penjelasan lebih rinci mengenai perwakilan BWI bisa dibaca pada Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan BWI.

F. Pembentukan Perwakilan BWI

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, BWI bisa membentuk Perwakilan BWI Provinsi maupun Perwakilan BWI Kabupaten/Kota. Pembentukan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan perwakilan BWI sebagaimana dimaksud diusulkan kepada BWI oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

Struktur organisasi Perwakilan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Dewan Pelaksana merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Pelaksana. Anggota Perwakilan BWI terdiri atas 14 orang. Sebanyak 3 orang duduk di Dewan Pertimbangan dan 11 orang lainnya di Badan Pelaksana. Ke-14 orang itu berasal dari unsur Kementerian Agama, pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia, cendekiawan, nazhir, ahli hukum, dan wirausahawan. Keanggotaan perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Perwakilan BWI Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam, terbentuk pada Januari 2015

Bangka Belitung, terbentuk pada November 2012

Banten, terbentuk pada Februari 2012
Bengkulu, terbentuk pada Desember 2013
DKI Jakarta, terbentuk pada Mei 2014
Gorontalo, terbentuk pada Juni 2012
Jambi, terbentuk pada Februari 2014
Jawa Barat, terbentuk pada April 2012
Jawa Tengah, terbentuk pada Oktober 2013
Jawa Timur, terbentuk pada Februari 2010
Kalimantan Barat, terbentuk pada Desember 2013
Kalimantan Selatan, terbentuk pada September 2014
Kalimantan Tengah, terbentuk pada Januari 2014
Kalimantan Timur, terbentuk pada April 2010
Kepulauan Riau, terbentuk pada Juni 2011
Lampung, terbentuk pada April 2014
Maluku, terbentuk pada Maret 2013
Nusa Tenggara Barat, terbentuk pada November 2013
Nusa Tenggara Timur, terbentuk pada April 2014
Riau, terbentuk pada Juli 2014
Sulawesi Barat, terbentuk pada April 2014
Sulawesi Selatan, terbentuk pada Juni 2014
Sulawesi Tengah, terbentuk pada Juli 2015
Sulawesi Tenggara, terbentuk pada Desember 2013
Sulawesi Utara, terbentuk pada September 2013
Sumatera Barat, terbentuk pada Januari 2012
Sumatera Selatan, terbentuk pada April 2014
Sumatera Utara, terbentuk pada Juli 2011
DI Yogyakarta, terbentuk pada September 2013
Bali, terbentuk pada November 2015
Maluku Utara, terbentuk pada November 2015
Papua, terbentuk pada Mei 2016
Papua Barat

Kalimantan Utara

G. Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengorganisasian Wakaf Produktif

Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, sekolahan, rumah yatim piatu, makam. Selama ini pemanfaatan wakaf dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang cukup efektif. Akan tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain – lain (Qahar, 2005:5).

Dalam UUD 1945 No 41 tahun 2004 pasal 28 menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan produktif. Produktif ini merupakan pengelolaan wakaf yang bersifat uang, sehingga penggunaannya bersifat produk yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dan dapat membantu kesejahteraan ekonomi umat sesuai tujuan dari harta wakaf yang diberikan. Hendaknya lembaga pengelolaan wakaf lebih menekankan pada pengelolaan wakaf produktif. Oleh karena itu pemanfaatan wakaf menjadi tidak berbentuk konsumtif akan tetapi menjadi produktif sehingga manfaat dan penggunaannya lebih fleksibel tanpa harus keluar dari syariat islam.

Wakaf produktif adalah wakaf yang tidak langsung diambil manfaatnya akan tetapi di berdayakan atau di golangkan dalam suatu bentuk usaha yang kemudian diambil hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak menerima (sesuai

kesepakatan peruntukan wakaf), dengan demikian wakaf dapat menunjang perekonomian masyarakat Indonesia. Banyak lembaga-lembaga yang bergerak di bidang wakaf produktif yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan harta wakaf menjadi sebuah harta yang produktif dan hasilnya dapat disalurkan kepada siapa saja sesuai dengan peruntukan wakaf. Maka perlu adanya pengelolaan wakaf yang baik agar dapat mencapai efektifitas dan efisiensi yang diharapkan.

Pengelolaan wakaf sangat penting dalam menunjang pemberdayaan tanah wakaf, pengelolaan yang baik tentunya akan menghasilkan income dari tanah wakaf yang besar untuk disalurkan kembali kepada yang diperuntukannya tetapi jika sebaliknya maka tentu akan mengurangi hasil yang akan diberikan kepada peruntukannya. Setelah diresmikannya UU No.41 Tahun 2004, kemudian Pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.

BWI ini berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan (Usman, 2009:132).

5

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No.4/2006 pasal 53, meliputi: Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum, penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan

⁵ Arif Rahman Hakim, Saeful Anwar, & Asep Iwan Setiawan 34 Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 1 No. 2 (2016) 21-34

pengembangan terhadap harta benda wakaf, penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf., penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak, penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya, pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut: Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf., meningkatkan profesionalitas dan keamanan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.⁶

H. Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Dalam hasil pengembangan benda-benda bergerak terutama wakaf tunai dipergunakan untuk membantu pihak-pihak seperti fakir, miskin, yatim piatu, biaya pendidikan, kesehatan, modal usaha, rehabilitasi orang cacat, pengembangan budaya, pembangunan rumah sakit dll.

Wakaf tunai yang dilakukan oleh BWI baik dalam pengelolaan dan pengembangannya, nazhir harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.

⁶ Himpunan peraturan perundang-undangan tentang wakaf no 41 tahun 2004: Kementrian Agama RI Direktorat Pemberdayaan wakaf, Jakarta: 2011.

2. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
3. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI setelah terlebih dahulu melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
4. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Dalam penghimpunannya wakif menyerahkan uang kepada nazhir kemudian nazhir boleh menginvestasikan assets (harta wakaf) langsung dan juga boleh berkerja sama dengan pihak LKS (lembaga keuangan syariah). Wakif juga dapat menunjuk kepada siapa investasi itu ditujukan, apabila tidak maka BWI yang akan menentukan sesuai dengan kajian atas kelayakan investasi. Setelah proses penghimpunan maka dilanjutkan dalam proses pengelolaan, dimana pada proses pengelolaan ini wakaf (Assest) yang telah di himpun diinvestasikan dalam finansial atau pun rill.⁷

Bentuk investasi finansial antara lain:

Pasar uang : Deposito di bank syariah, Unit link syariah dan lain-lain dan Pasar modal : saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah dan lain-lain.

Sedangkan investasi dalam bentuk rill/Proyek terbagi menjadi 2 antara lain:

Investasi langsung : Nazhir langsung berinvestasi mengelola satu proyek menggunakan uang seperti pembangunan kebun sawit, mall, apartement dan lainlain. Dan investasi tidak langsung : Nazhir tidak langsung berinvestasi dengan cara bekerja sama dengan pihak lain (bank syariah atau LKS lain). Kemudian proses Pendayagunaan dan penyaluran hasil investasi dibagikan sesuai dengan persetujuan di awal, biasanya penyaluran dana yang dihasilkan dari wakaf produktif di gunakan

⁷ Pedoman pengelolaan & pengembangan wakaf (jakarta;2003) hlm.29 (Dirjen Bimbingan masyarakat islam, 2003:29)

90% untuk mauquh alaih dan sisanya 10% diberikan kepada nazhir (Wawancara dengan Tatang Astarudin, 18 Maret 2016).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Dalam UUD 1945 No 41 tahun 2004 pasal 28 menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan produktif. Produktif ini merupakan pengelolaan wakaf yang bersifat uang, sehingga penggunaannya bersifat produk yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dan dapat membantu kesejahteraan ekonomi umat sesuai tujuan dari harta wakaf yang diberikan. Hendaknya lembaga pengelolaan wakaf lebih menekankan pada pengelolaan wakaf produktif. Oleh karena itu pemanfaatan wakaf menjadi tidak berbentuk konsumtif akan tetapi menjadi produktif sehingga manfaat dan penggunaannya lebih fleksibel tanpa harus keluar dari syariat islam.

B. Saran

Kami berharap bagi para pembaca dapat mengerti dan memahami tentang “Badan Wakaf Indonesia”

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia>, badan Wakaf Indonesia (BWI). 2008-07-31. Diakses Tanggal 2021-09-21.

Buku undang-undang nomor 41 tahun 2004 dalam Bab VI Pasal 47 sampai pasal 54 tentang Badan wakaf Indonesia (BWI). Dan peraturan pelaksanaannya terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya perwakafan di Indonesia.

Susunan Pengurus BWI Periode 2021-2024 | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id". Badan Wakaf Indonesia (BWI). Diakses tanggal 2021-09-21.

Arif Rahman Hakim, Saeful Anwar, & Asep Iwan Setiawan 34 Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 1 No. 2 (2016) 21-34

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang wakaf no 41 tahun 2004: Kementrian Agama RI Direktorat Pemberdayaan wakaf, Jakarta: 2011.

Pedoman pengelolaan & pengembangan wakaf (jakarta;2003) (Dirjen Bimbingan masyarakat islam, 2003:29)